

## DAFTAR REFERENSI

- Brahmanta, Dewa Gede Ari Yudha, and Anak Agung Sri Utari. "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2017).
- Putri Utami Dian Safitri, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Produk Kosmetik Yang Menyesatkan," *fakultas Hukum, Universitas Jember* 26, no. 2 (2021): 2,
- Vigenia Herzantiwi dan Tatty Aryani Ramli, "Kewajiban Pencantuman Label Informasi Produk Kosmetik Impor Dalam Bahasa Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73 /M- DAG / PER / 9 /2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam BahasaIndonesia Pada Barang" (2015). *jurnal hukum UNISBA*: hal.152–155.
- Akbar Fitri, Yanto Solehudin, dan Eny Sulistyowati, "Kajian Yuridis Terkait Pencantuman Label Dalam BahasaIndonesia" (2021). *Jurnal UNESA*: hal.1–14.
- Dina rahmawaty Destria indah sary, *Buku Ajar Teknologi Kosmetika* (malang: CV IRDH, 2019).
- yulia & Ambarwati, *Dasar-Dasar Kosmetika Untuk Tata Rias*, ed. m.pd prof.dr.zulfiati, *Dasar-Dasar Kosmetika*, vol. 53 (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, 2015)
- Slamet Budi Asih, "Dampak Pengguna Kosmetika Pemutih Terhadap Kesehatan Kulit Pada Ibu-Ibu di RW Desa Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang ,Jawa Tengah Tahun 2005". *Jurnal UNNES*. hal 29
- Iervony fridela, "Perlindungan Konsumen Atas Pemenuhan Hak Informasi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Diendorse Oleh Selebgram Di Pekanbaru, Riau" (universitas islam indonesia,yogyakarta, 2019). *Jurnal Hukum UII* hal 23-25

Lina Pangaribuan, “Efek Samping Kosmetik Dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan,” *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* (2017): 20–28.

Waluyo, dan Prasetyo, “Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pencantuman Label BerBahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Dalam Negeri.” *Jurnal Yuridis*.

Muhamad Qustulani, *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum Dan Konsumen* (Nusantara Tangerang: PSP Nusantar Pers, 2018).

Rani Apriani, dan Atsar Abdul, "Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen" (Sleman, 2019). hal 27.

Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review),” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–666..

Ni Putu Januaryanti Pande, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di Bbpom Denpasar,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 1 (2017): 13.

Rosmawati y, dan rendy, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok, 2018).

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (jakarta, 2017).

wiwik sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhdap Produk Pangan Kadaluarsa*, 2016.hal 9

Nasution, Az. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*. Hal 37

Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, Hal.74.

Subekti, “Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional”, (1992)

Octavia I, “Tanggung Jawab Hukum Perdata Atas Kesepakatan Bersama Dalam Penitipan Anak,” (2018),. Jurnal Hukum UMSU.

arinus Angipora, “Modul Labeling & Packaging” (2018).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Bahasa,” Kementerian Pendidikan,

Kbbi.Lektur.Id.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram:, 2020), Hal 116.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yado. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta.  
Hal 3

Marcelo Leonardo Tuela, “Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan,” *Lex Privatum* 2, no. 3 (2014): hal.65.

Lastini, 2016, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.4 No.6,

DPR.go.id

janus Sidabalok. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,

Rusli, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung,2012“Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen.”

Marnia Rani, Pengantar Hukum Bisnis (tanjungpinang: Umrah Press, 2015).

Marnia Rani, Perancangan Kontrak (tanjungpinang: Umrah Press, 2015).

Wahyu Sasongko, 2007, KetentuanKetentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,Bandar Lampung:Penerbit Universitas Lampung, hlm. 93.

Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan” (2017): hal 24.

